



Implementation of E-Government in The Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District)

Implementasi *E-Government* di Sektor Transportasi (Studi Pada Sumberdaya Program *Area Traffic Control System* Kabupaten Sidoarjo)

Muhammad Erlangga Surya Mustika*, Ilmi Usrotin Choiriyah, A. Riyadh U.B

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

ABSTRACT

Technological advances that are increasingly developing make the government have to issue policies, because of the large number of road users who cause congestion at every intersection in Sidoarjo, the Area Traffic Control System (ATCS) program is implemented to optimize the implementation of traffic management control. system, in order to create control over traffic violators. traffic and minimize congestion at crossroads. This research is a qualitative descriptive study using purposive sampling technique in determining informants. For the informants, the Head of Traffic Management and Engineering, Members of the ATCS Program Operations and Community Users of Motorcycles, Cars and Public Transportation. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data analysis technique used an interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study aims to identify and analyze the resources for the following indicators: The human resources of the existing apparatus carry out their duties and functions well in operating the ATCS Program, budget sources are adjusted to regional income, equipment resources provide the maximum possible service if there is damage to be repaired immediately, authority resources are related to sector transportation traffic on the road, such as development, monitoring, controlling and evaluating the communication system so that it relates to the operation of the Area Traffic Control System program.

Keywords: Public Policy, Policy Implementation, Area Traffic Control System Program

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, karena banyaknya pengguna jalan yang menyebabkan kemacetan di setiap simpang di Sidoarjo, maka diterapkan *program Area Traffic Control System* (ATCS) untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian manajemen lalu lintas. Sistem, dalam rangka menciptakan kontrol atas pelanggaran lalu lintas dan meminimalkan kemacetan di persimpangan jalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Untuk informan Kabag Manajem dan Reka-

OPEN ACCESS

ISSN 2338-445X (online)

ISSN 2527-9246 (print)

Edited by:

Sulikh Asmorowati

Reviewed by:

Lely Indah Mindarti and Bambang Kusbandrijo

*Correspondence:

Muhammad Erlangga Surya Mustika

erlanggasurya56@gmail.com

Published: 29 April 2022

Citation:

Mustika, M.E.S & Ilmi (2022) Implementation of E-Government in The Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District).

JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik). 10:1

doi: 10.21070/jkmp.v10i1.1688

yasa Lalu Lintas, anggota pengoperasian program ATCS dan masyarakat pengguna sepeda motor, mobil dan angkutan umum. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya untuk indikator berikut: Sumber daya manusia aparatur yang ada menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjalankan Program ATCS, sumber anggaran disesuaikan dengan pendapatan daerah, sumber daya peralatan memberikan pelayanan semaksimal mungkin jika ada kerusakan segera diperbaiki, sumber daya kewenangan terkait sektor lalu lintas transportasi di jalan, seperti pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem komunikasi sehingga berkaitan dengan pengoperasian program Sistem Pengendalian Lalu Lintas Kawasan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Program Sistem Pengendalian Lalu Lintas Kawasan

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) pasal 1 ayat 29, menjelaskan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah bentuk usaha dalam melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Undang-Undang di atas mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas, diperkuat dengan adanya PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015. Kemudian pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bergantungnya masyarakat dengan alat transportasi karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang yang membuat pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, seperti memperluas jalan atau mengurangi pengendara dengan sistem ganjil genap seperti yang diterapkan di Ibukota Jakarta. Pemerintah sudah memberikan edukasi bagaimana cara berkendara dengan baik dan benar meskipun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keselamatannya. Hal tersebut dikarenakan akan berdampak pada pengguna jalan mengalami resiko seperti terjadinya kemacetan dan kecelakaan di jalan raya. Masyarakat yang melanggar lalu lintas dan menyebabkan resiko kecelakaan lalu lintas, harus diberikan hukuman berupa denda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan adanya program ATCS setidaknya dapat meminimalisir kemacetan yang terjadi sehingga arus lalu lintas menjadi lancar dan petugas dapat memantau pengendara yang tidak taat lalu lintas. Namun, meskipun dengan adanya program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kabupaten Sidoarjo yang ada saat ini, masih belum menunjukkan dampak yang terlihat sehingga apabila dapat dinilai masih belum optimal jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang telah melaksanakan program ini. Sehingga tugas dan tanggung jawab adanya para petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dipertanyakan terkait keproduktifan dalam penyampaian dan memberikan informasi yang transparan terkait program *Area Traffic Control System*. Berikut dapat dilihat tabel 1 di bawah tentang jumlah unit CCTV yang terhubung dengan *Area Traffic Control System* di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1
Jumlah Unit CCTV yang terhubung dengan Area Traffic Control System di Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Jumlah unit	Lokasi
Tarik	-	-
Prambon	1	Depan Kecamatan Prambon.
Krembung	-	-
Porong	1	Lapindo.
Jabon	-	-
Tanggulangin	1	Simpang 3 Tanggulangin.
Candi	6	Dishub Sisi Selatan, Dishub Sisi Utara, PT ECCO, Simpang 3 Candi c1, Simpang 3 Candi c2, Depan Umsida.
Sidoarjo	31	Simpang 3 Pucang, Simpang 3 Larangan, Simpang 4 Celep, Simpang 4 Pemda, Simpang Erlangga, Gajahmada c1, Gajahmada c2, Pendopo Alun Alun, Exit Tol Raya Jati, Depan Masjid Agung, Rel Kereta Api Pasar Larangan, RSUD 1, RSUD 2, Simpang Taman Gajah Mada, jl. A yani, jl. Thamrin, Simpang Trunojoyo, Depan Lippo Mall, jl. Teuku umar, Pasar Larangan, Simpang 3 Cemengkalang, Simpang 3 Sidokare, Simpang Ramayana 1, Simpang Ramayana 2, Jalan Pahlawan, Bundaran Tpi, jl. Sisimangaraja, jl. Raya gajah mada, Depan Polresta Sidoarjo, Lingkar Timur, Ssc Sidoarjo.
Tulangan	-	-
Krian	5	Simpang 4 Krian c1, Simpang 4 Krian c2, Simpang 3 Kemasen, Terminal Krian, Bypass Krian Balongbendo.
Wonoayu	3	Simpang 4 Pilang c1, Simpang 4 Pilang c2, Simpang 4 Wonoayu
Balongbendo	1	Pos Polisi Bakalan.
Taman	1	Mako Brimob.
Sukodono	2	Simpang 4 Dungus, Simpang 4 Kebonagung.
Buduran	16	Simpang 3 Transmart, Simpang 4 Pagerwojo, Simpang 4 Maspion c1, Simpang 4 Maspion c2, Simpang 4 Prasung c1, Simpang 4 Prasung c2, Layang Jenggolo Selatan, Layang Jenggolo Utara, Simpang 3 Buduran 01, Simpang 3 Buduran 02, Pom Bensin Jenggolo, Pasar Buduran, Kahuripan Nirwana, Simpang Jenggolo, Simpang 4 Maspion c3, Simpang 3 Avian.
Gedangan	11	Simpang 4 Gedangan c3, Simpang 4 Seruni c1, Simpang 4 Seruni c2, Simpang 4 Gedangan c1, Simpang 4 Gedangan c2, Depan Marinir, jl. Raya tebal c1, jl. Raya tebal c2, Bundaran Aloha, Simpang 4 Seruni c3, Simpang Hangtuah.
Sedati	3	Simpang 4 pabean, bypass juanda simpang 3, jl. Raya sedati.
Waru	3	Jembatan Layang Waru, Simpang Pabrik Paku, Simpang Dea Bungurasih.
Jumlah	85 Unit	

Sumber: Hasil penelitian (2022)

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas tentang jumlah unit CCTV yang terhubung dengan Area Traffic Control System di Kabupaten Sidoarjo berjumlah 85 unit. Hal tersebut bisa dikatakan terjadi perkembangan pada setiap tahunnya. Pertama kali adanya program ATCS di tahun 2015, Kabupaten Sidoarjo hanya mempunyai 3 Unit dan masih terkendala pada keterbatasan dana. Sehingga hal tersebut, dapat mempengaruhi pelaksanaan program dan berdampak pada lambatnya proses dalam melancarkan koneksi jaringan serta adanya kerusakan pada sistem yang memerlukan waktu untuk dilakukan perbaikan. Selain itu, infrastruktur yang kurang optimal akan menyebabkan terdampaknya pada kinerja pengoperasian Program ATCS di Kabupaten Sidoarjo. Saat ini, ATCS yang dapat diakses hanya 33 unit secara bergantian. Pengoperasionalan dari 33 unit tersebut memerlukan sumber daya yang lebih memadai untuk dapat mengoptimalkan program ini. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul "Implementasi E-Government dalam mengembangkan sumber daya pada sektor transportasi di Kabupaten Sidoarjo. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Implementasi E-Government dalam Mengembangkan Sumberdaya pada Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi E-Government Dalam Mengembangkan Sumberdaya Pada Sektor Transportasi di Kabupaten Sidoarjo.

Implementasi

Implementasi adalah tahap yang pasti dalam siklus pendekatan karena tanpa eksekusi yang layak, pilihan pembuat strategi tidak akan dilakukan secara efektif. Menurut Wahab dalam Sahya (2012) adalah suatu rangkaian pelaksanaan pilihan strategi, yang biasanya berupa undang-undang, undang-undang tidak resmi, pilihan hukum, perintah pemimpin, atau pengumuman resmi. Dalam (Suharno, 2013) pelaksanaan pengaturan publik dengan pemahaman dibawa oleh negara melalui organisasi pemerintah. Karena pada hakekatnya adalah tugas otoritas publik untuk melakukan salah satu kewajibannya, khususnya bantuan pelayanan.

Kualitas Sumber Daya

Menurut Edward III dalam (Agustino, 2017) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan, berikut penjelasannya:

1. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam (Agustino, 2017) menyatakan bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsistennya urutan implementasi lebih penting lagi apa yang ditransmisikan, jika petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif.
2. Sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi pada para pelaku.
3. Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
4. Sumber daya kewenangan dapat dijelaskan kewenangan ini menjadi penting ketika dihadapkan dengan permasalahan, sehingga mengharuskan agar segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Sebagai pelaksana kebijakan harus diberikan wewenang yang cukup dalam membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangan.

E-Government

E-Government adalah struktur atau model kerangka kerja administrasi dalam pandangan kekuatan inovasi komputerisasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan otoritatif, administrasi ke daerah, kontrol dan kontrol aset asosiasi, keuangan, biaya, tol, perwakilan, dan lain sebagainya dalam satu kerangka. Menurut (Indrajit, 2016) *E-*

Government adalah perubahan dalam hubungan antara otoritas publik dan area lokal dan individu lain yang diinvestasikan, termasuk pemanfaatan inovasi data (khususnya web) yang ditentukan untuk lebih mengembangkan kualitas administrasi. *E-Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang di teliti, menjelaskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Fokus Penelitian ini yaitu implementasi *e-government* dalam mengembangkan sumber daya pada sektor transportasi di Kabupaten Sidoarjo. Indikator sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sidoarjo dan terkait dengan pelaksanaan Program Area Traffic Control System (ATCS) di Dinas Perhubungan. Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*, untuk informannya Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Anggota Pengoperasian Program ATCS dan Masyarakat Pengguna Kendaraan Motor, Mobil dan Angkutan Umum. Jenis data diambil dari berbagai sumber yaitu dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Area Traffic Control System Kabupaten Sidoarjo

Area Traffic Control System atau dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas persimpangan. ATCS terdiri dari beberapa sistem utama, diantaranya:

1. Server dan workstation yang berfungsi sebagai pusat operasional untuk memonitor dan mengontrol kondisi lalu lintas dan seluruh persimpangan satu area.
2. Wall Map berfungsi menyediakan informasi status dan kondisi layar monitor.
3. Local Controller yang berfungsi untuk mengontrol persimpangan
4. Video Surveillance yang berfungsi memantau melalui jaringan kamera CCTV
5. Vehicle Detector yang berfungsi untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan yang terpantau melalui CCTV.



Gambar 1. Ruangan Pemantauan CCTV di Kabupaten Sidoarjo

Fungsi, Tujuan dan Pengoperasian *Area Traffic Control System (ATCS)* adalah sebagai berikut :

1. Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi dalam keadaan tertentu.
2. Memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam Kendaraan, Ambulance, VVIP, Konvoi, Dll). Sesuai dengan UU 22 tahun 2009 pasal 134.
3. Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan jika terjadi kemacetan (penumpukan kendaraan pada ruas jalan).
4. Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan.

Tujuan *Area Traffic Control System (ATCS)* adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya optimasi kinerja jaringan jalan.
2. Mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat dan berwawan lingkungan.
3. Mengurangi jumlah dan beban petugas pengatur lalu lintas di persimpangan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan umum
5. Untuk mencapai kinerja lalu lintas yang optimal dengan meminimalkan tundaan di setiap simpang yang dikoordinasikan dan mempersingkat waktu tempuh, dan salah satu strategi dalam upaya pengurangan emisi dari sektor transportasi.

Pengoperasian *Area Traffic Control System (ATCS)* sebagai berikut :

- a. Pengatur arus persimpangan berupa lampu lalu lintas.
- b. Penginput data lalu lintas berupa kamera CCTV pemantau.
- c. Pengirim data berupa jaringan kabel data atau pemancar gelombang.
- d. Software sistem ATCS.
- e. Ruang kontrol (*Central Control Room*) ATCS beserta operatornya.
- f. Website untuk informasi kepada masyarakat.

Dimensi Sumber Daya

Dimensi Sumberdaya merupakan bagian dari implementasi kebijakan yang dilaksanakan pemerintah sebagai salah satu alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam mengeluarkan kebijakan. Dalam pelaksanaan program di Kabupaten Sidoarjo pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana memberikan pelayanan berbentuk elektronik berupa himbuan kepada pengguna jalan untuk mematuhi satandar dalam berkendara, agar meminimalisir kemacetan, kecelakaan dan melanggar lalu lintas. Berikut indikator pada dimensi sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

1. Sumber Daya Manusia

Merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Jika petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Sebaliknya dengan adanya sumber daya manusia yang kinerjanya baik dapat dikembangkan kembali sehingga implementasi program tersebut akan berjalan dengan optimal. Sumber daya manusia dapat mempengaruhi bidang manajemen dan lalu lintas. Hasil dari sumber daya manusia di Kabupaten Sidoarjo, sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan sumber dayanya dapat dikatakan melaksanakan tugasnya dengan cukup baik, namun selaku petugas masih belum maksimal memberikan pelayanan berupa himbuan kepada masyarakat terkait dengan keselamatan berkendara. Sebagai bahan dalam mendukung hasil wawancara ini yakni tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Nama Petugas ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Nama Lengkap	Pendidikan	Jabatan	Kode
Febrian yudiantoro	SMA	Tenaga petugas operator atcs	A
Steven owen purnawan	SMK	Tenaga petugas operator atcs	B
Muhammad nuzul a.a.	SMA	Tenaga petugas operator atcs	C
Ella resmi melinda	D4	Tenaga petugas operator atcs	D
Narendra wafa rahmania	D4	Tenaga petugas operator atcs	E

Tabel 2 menjelaskan bahwa terdapat 5 petugas ATCS di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. dua petugas dengan pendidikan terakhir D4 dan 3 petugas lainnya berpendidikan terakhir tingkat sekolah menengah atas (SMA). Kelima petugas tersebut bertugas mengoperasikan program *Area Traffic Control System* dan terkait kode menunjukkan waktu mereka bekerja dalam pengoperasian *Area Traffic Control System*. Sedangkan terkait jadwal shift petugas dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Jadwal Shift Petugas Atcs Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Hari	Jam		
	08.00 - 16.00 WIB	16.00 - 00.00 WIB	00.00 - 08.00 WIB
Senin	A	B	C
Selasa	D & E	A	B
Rabu	C & D	E	A
Kamis	B & D	C	E
Jum'at	A & D	B	C
Sabtu	E	A	B
Minggu	A	D & E	C

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Tabel 3 di atas menjelaskan terkait pergantian shift petugas yang mengoperasikan program *Area Traffic Control System* yang dilaksanakan setiap hari selama 24 jam dengan melakukan pergantian shift kerja meskipun jumlah operator berjumlah 5 orang tetapi sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara maka pada dimensi sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan program ini, mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yang terkait program *Area Traffic Control System* ini. Oleh karena itu dalam hal sumber daya manusia haruslah yang berkualitas. Dikarenakan agar dapat mengoperasikan ATCS, pegawai dituntut untuk bekerja secara optimal. Seperti pemahaman dan *jobdesk* sebagai pegawai ATCS.

2. Sumber Daya Anggaran

Anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal. Keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi pada para pelaku. Dalam pelaksanaan program *Area Traffic Control System* sangat diperlukan sumber daya anggaran agar dapat direalisasikan sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan dan mulai berkembang seiring kemajuan teknologi. Terkait sumber daya anggaran dapat di sesuaikan dengan pendapatan daerah, karena jikalau pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo terlalu menuntut itu justru akan tidak baik bagi pelaksanaan setiap kebijakan yang ditetapkan. Namun, apabila anggaran tersebut ada sisa anggaran akan ditabung untuk pelaksanaan program ATCS yang lebih baik lagi. Sebagai bahan dalam mendukung hasil wawancara yang telah di disampaikan dalam bentuk tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Anggaran Pemeliharaan CCTV dan Area Traffic Control System Tahun 2021

Uraian	Sebelum Perubahan			
	Vol	Satuan	Harga	PPN
Pemeriksaan CCTV	1	Paket	100.000.000	0
Pemeliharaan CCTV (ATCS)	1	Paket	100.000.000	0
Jumlah	2	Paket	200.000.000	0

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Tabel 4 di atas menjelaskan terkait anggaran dalam pemeliharaan CCTV dan *Area Traffic Control System* di tahun 2021 digunakan untuk pelaksanaan program, karena anggaran rencana keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumberdaya Anggaran dalam pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan program *Area Traffic Control System* sangat diperlukannya sumberdaya Anggaran agar dapat direalisasikan sesuai dengan kebijakan yang telah diberikan, agar tujuannya dapat dicapai sehingga mempermudah masyarakat dalam merasakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

3. Sumber Daya Peralatan

Meningkatnya Fasilitas dan perekonomian Kota akan menimbulkan pertumbuhan penduduk dengan menimbulkan daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke kawasan perkotaan dengan tujuan mencari lapangan pekerjaan, banyak patokan yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja pembangunan bidang perhubungan, dengan Pengembangan sektor transportasi perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan fungsi dan hirarki jaringan jalan dan hal tersebut dapat berdampak baik dalam penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan transportasi dan layanan jasa perhubungan lainnya. Sarana merupakan fasilitas yang digunakan untuk menunjang kinerja para petugas serta mempermudah pelayanan untuk masyarakat agar dipermudah dalam segala hal kepengurusan dan hal tersebut sangat penting dari berbagai aspek, terkait dengan semua pelaksanaan program-program yang berada di Dinas Perhubungan ini kami akan terus berusaha memaksimalkan program yang kami kelola karena untuk saat ini bisa dikatakan cukup optimal tetapi belum yang terbaik maka dari itu kedepannya diharapkan bisa semaju kota-kota yang besar, karena Sidoarjo saat ini sudah mulai padat dengan kendaraan, semisal ada kerusakan yang berkaitan dengan lalu lintas dapat menghubungi dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo, pihak dinas akan segera memperbaiki kerusakan yang membuat lambatnya pelayanan untuk masyarakat, seperti kerusakan pada jaringan rambu lalu lintas, CCTV, sistem ATCS dan sebagainya yang termasuk program Dinas Perhubungan kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumberdaya peralatan dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang digunakan untuk menunjang kinerja para petugas serta mempermudah pelayanan untuk masyarakat agar dipermudah dalam segala hal kepengurusan. Hal tersebut dinilai sangat penting dari berbagai aspek, seperti program-program yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo untuk sarana dan prasarana bisa dikatakan cukup optimal dan terkait kerusakan jaringan atau sistem yang bermasalah akan langsung diperbaiki dengan maksimal dan semua dapat diterapkan terkait program ATCS yang akan dilaksanakan pada setiap persimpangan kabupaten Sidoarjo.

4. Sumber Daya Kewenangan

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk pelaksanaan program ATCS di Kabupaten Sidoarjo, dinas perhubungan mempunyai kewenangan karena sebagai pengatur di sekitar lalu lintas jalan

seperti mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi, apabila ada keadaan tertentu memberikan waktu kepada kendaraan yang memiliki prioritas (Pemadam Kebakaran, Ambulance, VVIP) dan memberikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan serta menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di area persimpangan, sedangkan untuk menindaklanjuti pengguna jalan yang melanggar diperlukan adanya operasi gabungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelanggaran di jalan, dikarenakan pihak dari dinas perhubungan hanya bertugas memberikan himbauan terkait dengan kelengkapan berkendara tidak melanjutkan ke arah penilangan hal tersebut sudah menjadi tugas kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara pada dimensi sumber daya kewenangan dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan mempunyai kewenangan terkait dengan sektor transportasi lalu lintas di jalan, seperti pembangunan, pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan dan lagi program *Area Traffic Control System* ini berfungsi untuk melakukan pemantauan di jalan sekitar persimpangan yang rawan kemacetan hal tersebut kewenangan yang pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo laksanakan dengan cara memantau melalui CCTV, sedangkan untuk menindaklanjuti pelanggaran di jalan pihak Dinas Perhubungan juga bisa melakukan tetapi dengan pihak kepolisian.

KESIMPULAN

Indikator-indikator dalam sumber daya menunjukkan bahwasanya: Pertama, sumber daya manusia yaitu petugas yang ada melaksanakan kinerjanya dengan optimal sesuai peraturan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, terkait pergantian shift petugas yang mengoperasikan program *Area Traffic Control System* dilaksanakan setiap hari selama 24 jam dengan melakukan pergantian shift kerja meskipun jumlah operator berjumlah 5 orang tetapi sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang diberikan. Kedua, sumber daya anggaran itu disesuaikan dengan pendapatan setiap daerah, apabila terlalu menuntut lebih dapat menimbulkan terhambatnya pelaksanaan kebijakannya. Ketiga, sumber daya peralatan pihak Dinas Perhubungan tetap memberikan pelayanan semaksimal mungkin apabila ada kerusakan dari CCTV, atau sistem yang terjadi gangguan, akan langsung diperbaiki dengan maksimal agar masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dalam mentaati peraturan. Keempat, sumber daya kewenangan terkait dengan sektor transportasi lalu lintas di jalan, seperti pembangunan, pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi sistem perhubungan.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini menggunakan dana pribadi dari penulis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas dukungannya sehingga artikel kami dapat di publish di Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik.

REFERENCES

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Devia., Prihanika. (2020). Implementasi Fasilitas Intelligent Transportation System (ITS) Di Kota Palangka Raya. *Media Ilmiah Teknik Sipil*. 8(2), 72-78.
- Florance, S. (2018). Inovasi Pelayanan Publik (Studi Tentang Surabaya Intelligent Transport System. 6(8).
- Nur, B., Wulan, N.D.N., Fadil, M. (2020). Efektivitas Program Rttic Dan Atcs Untuk Mengatasi Kemacetan Di Kota Malang (Studi Kasus : Dishub Kota Malang.
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Andi.
- Rijal. (2019). Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar. *Matra Pembaruan*. 3 (1), 47-56.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik ; kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Ombak.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komutindo.
- Zaharatul, A., Hutapea, F., Ramadhania, N. (2020). Implementasi Sistem Pengawasan Cctv Lalu Lintas Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan). 11-13.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Muhammad Erlangga Surya Mustika, Ilmi Usrotin Choiriyah, A. Riyadh U.B. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.